

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor publik di Indonesia semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara, tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi & Fernanda, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, terdapat tiga prinsip utama dalam pemerintahan yang baik yaitu : partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak, 2005). Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KSAP, 2005).

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Compo and Tomasi, 1999). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002).

Pada kenyataannya masih terdapat lembaga/badan pemerintah yang belum mengimplementasikan transparansi tersebut seperti dalam hasil laporan, Fraksi Demokrat mengemukakan sampai saat ini masyarakat masih merasakan belum optimalnya kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat meminta agar otoritas tertinggi di Pemda menempatkan orang-orang profesional terutama di dinas-dinas dan instansi-instansi strategis serta menghilangkan budaya dan praktek KKN di kalangan birokrasi dan penegak hukum dengan cara membuat sistem yang transparan dan akuntabel serta menempatkan orang-orang yang mempunyai jejak rekam yang baik (DPRD Prov. Jawa Barat, 2010). Pemerintah juga

mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan aparatur pemerintah (Badjuri dan Trihapsari, 2004).

Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan setiap tahunnya dinilai oleh auditor eksternal pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk opini. Opini merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa opini yang diberikan oleh BPK, diantaranya : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Indikator bahwa laporan keuangan

pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo,2002).

Menurut BPK Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 76% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015. Sehingga berdampak pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini WDP dan TMP dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dari 21% dan 3% pada tahun 2011 menjadi 30% dan 5% pada tahun 2015 (BPK, 2016). Hal tersebut ditambah dengan banyak pegawai-pegawai di Indonesia, khususnya yang bekerja di instansi pemerintah terjangkit patologi etos kerja atau yang lebih dikenal dengan virus-virus penyakit yang bisa menular dari satu orang ke orang lain. Virus penyakit yang dimaksud disini adalah fenomena sosial pegawai yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, moralitas, dan rasionalitas yang dipersyaratkan oleh pimpinan. Fenomena yang kerap menghiasi instansi/lembaga/badan pemerintahan ini seakan tidak bermuara, karena sudah berjuta cara dilakukan tetapi pegawai-pegawai yang nakal masih tetap saja ada. Kenakalan pegawai tersebut dimulai dari hal yang kecil seperti datang terlambat, bolos kerja, bermain game atau *social network* , dan bahkan melakukan korupsi (Harian Kompas edisi 20 November 2012/Kompas.com).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Azri Akmal Hermana (2015) yang berjudul pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap

Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung) dengan hasil bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Sri Ayu Wulandari (2014) yang berjudul pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Pinrang) dengan hasil bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Regional III BKN Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Regional III BKN Bandung.

3. Bagaimana pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Regional III BKN Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informai yang terkait dengan Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Regional III BKN Bandung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Regional III BKN Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Regional III BKN Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Regional III BKN Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga pada akhirnya dapat menunjukkan kinerja yang optimal.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk penulisan karya ilmiah dengan topik sama dan hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih mendalam.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk Keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Regional III BKN Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada periode September 2016 sampai dengan 18 Januari 2017.